

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pasal 27 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah komponen yang penting didalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang menunjang aktivitas di daerah sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber penerimaan PAD dapat digali terus agar dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Temanggung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Temanggung merupakan kabupaten cantik yang diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Hal ini yang membuat daya tarik Temanggung sebagai Kabupaten dengan wisata alam yang mempesona. Letak Temanggung yang berada di dekat Kabupaten Magelang yang terkenal dengan Candi Borobudur dan Kabupaten Wonosobo yang terkenal dengan Dieng, sehingga mempermudah wisatawan untuk menjangkanya. Banyak wisatawan dalam negeri bahkan manca negara yang tak segan mengunjungi kabupaten ini. Terdapat banyak tempat wisata, hotel, villa, dan restoran dengan latar alam yang menambah minat

wisatawan untuk mengunjungi kabupaten ini. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berasal dari PAD berupa pajak hotel, restoran, villa, dan retribusi tempat wisata.

PAD kabupaten Temanggung bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung terealisasi sebesar Rp307.431.695.076 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp47.887.604.813, Pendapatan Retribusi Daerah Rp9.181.047.632, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp18.800.858.165 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp231.562.184.466. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Temanggung sebesar 122,01% dari total yang dianggarkan.

Menurut Syarif Hidayat (2000) untuk memperkuat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai tolak ukur kemandirian suatu daerah. Suatu daerah dapat dianggap mandiri apabila mampu membiayai pembangunan daerahnya dengan sumber daya daerah itu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber daya daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pembangunan daerah akan berjalan cepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Menurut CaLK Kabupaten Temanggung tahun 2020 terdapat beberapa kendala dalam peningkatan pendapatan dikomponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti belum optimalnya manajemen Pendapatan Asli Daerah. Terdapat

beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti meningkatkan pengelolaan PAD, melakukan pengendalian sumber-sumber PAD, melakukan pengawasan saat pengumpulan PAD, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, dan meningkatkan komunikasi terkait PAD antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya peningkatan PAD.

Adanya kendala dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menarik perhatian penulis untuk lebih mengetahui mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung. Dengan penerapan akuntansi pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi optimal. Berdasar hal tersebut, penulis akan menuliskan tinjauan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengakuan dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung?
- 2) Bagaimana pengklasifikasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung?

- 3) Bagaimana pengungkapan dan penyajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung?
- 4) Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- 2) Untuk mengetahui klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- 3) Untuk mengetahui cara pengungkapan dan penyajian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung
- 4) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ruang lingkup yang dibahas yaitu Tinjauan atas penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1) Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait penerapan akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah sehingga pengelolaan keuangan Negara dapat terlaksana dengan baik.

2) Manfaat Praktis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya mengenai akuntansi pendapatan dan sebagai evaluasi serta masukan untuk penerapan akuntansi Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Temanggung.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori dan kebijakan yang diterapkan pemerintah yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan mengenai penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan KTTA ini, gambaran umum Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mencakup profil, visi dan misi, sejarah singkat, dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung yang meliputi definisi, klasifikasi, pencatatan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan dibandingkan antara kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan teori dan ketentuan PSAP 02, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas oleh penulis serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.